

Judul : Kopdes merah putih, saatnya perkuat gerakan koperasi
Tanggal : Jumat, 19 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kopdes Merah Putih

Saatnya Perkuat Gerakan Koperasi



Nurdin Halid

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menekankan pentingnya strategi efektif agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP) berjalan lancar. Karena, program penting ini merupakan instrumen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Ia mendesak Kementerian Koperasi (Kemenkop) segera melakukan pembenahan agar Kopdeskel MP memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa sekaligus memperkuat masa depan gerakan koperasi di Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan program ini harus ditopang oleh tata kelola yang kokoh, instruktur koperasi berpengalaman, serta kepastian hukum kelembagaan. Pelatihan puluhan ribu manajer Kopdeskel akan lebih efektif bila melibatkan ribuan instruktur bersertifikat yang sudah tersebar di seluruh Indonesia melalui Lembaga Pendidikan Koperasi (Lapenkop).

Ia juga menekankan, Kopdeskel MP harus merangkul seluruh UMKM desa dan kelurahan sebagai anggota. Kehadirannya tidak boleh mematikan usaha kecil, melainkan menjadikan warung-warung UMKM sebagai mitra kerja sama.

Dalam hal pembiayaan, Nurdin menolak penggunaan dana desa sebagai jaminan pinjaman Kopdeskel ke Bank Himbara. Kepala desa hanya berperan sebagai pengawas

ex-officio, bukan penanggung jawab finansial koperasi, sehingga tidak adil bila mereka dibebani risiko cicilan saat koperasi gagal membayar.

Untuk menjaga integritas, ia mendorong pembentukan Komite Etik dari tingkat pusat hingga kabupaten. Komite ini berfungsi memantau dan menerima pengaduan anggota Kopdeskel jika ada indikasi kepala desa atau lurah melakukan pelanggaran etika dalam kapasitasnya sebagai pengawas ex-officio.

Nurdin juga menekankan pentingnya sosialisasi mengenai Manual Book Kopdeskel MP, mulai dari sistem kerja, manajemen koperasi, model bisnis setiap unit usaha, hingga indikator keberhasilan. Manual Book tidak cukup hanya dibagikan kepada pengurus, tetapi juga harus dipublikasikan secara terbuka melalui website resmi agar transparansi koperasi terjamin.

Selain membangun Kopdeskel MP, Kemenkop juga diminta bertanggung jawab atas kemajuan ratusan ribu koperasi yang sudah ada di berbagai sektor. Menurut Nurdin, menteri koperasi bukan hanya menteri untuk Kopdeskel MP, melainkan juga untuk seluruh koperasi, sehingga perlu memperkuat regulasi, membuat kebijakan yang berpihak, dan mendorong kolaborasi antar koperasi.

Ia juga menyoroti dualisme Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang hingga kini belum selesai. Padahal, Dekopin, Dekopinwil, dan Dekopinda merupakan mitra strategis pemerintah karena diisi para praktisi berpengalaman di bidang koperasi.

Lebih jauh, Nurdin mendorong agar pengurus dan manajemen Kopdeskel MP mengembangkan bisnis berbasis sumber daya alam, budaya lokal, dan kebutuhan anggota. Koperasi bukan semata-mata soal keuntungan lembaga, melainkan juga pengembangan usaha anggota seperti petani, nelayan, peternak, pengrajin, pedagang kecil, dan pelaku UMKM. ■ TIF